

Konstruksi Makna dan Intersubjektivitas Legislator Pendatang Baru: Studi Fenomenologi Alfred Schutz terhadap Komunikasi Politik Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes

Aenun Mukaromah¹, Surahmadi²

^{1,2} Universitas Peradaban, Indonesia

Korespondensi: aenunmskj004@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received July 25th, 2026

Revised Aug 23th, 2026

Accepted Sept 1th, 2026

Kata Kunci:

Alfred Schutz; Fenomenologi;
Intersubjektivitas; Komunikasi
politik; Konstruksi makna;
Legislator pendatang baru.

ABSTRAK

Komunikasi politik berperan penting dalam pelaksanaan fungsi legislator, terutama bagi legislator pendatang baru yang sedang membentuk pemahaman mengenai peran politiknya. Penelitian ini menganalisis konstruksi makna dan intersubjektivitas komunikasi politik Arifin sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes melalui perspektif fenomenologi Alfred Schutz. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif, dan metode fenomenologi. Informan dipilih secara purposive, sedangkan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña serta konsep stock of knowledge, because motive, in-order-to motive, dan intersubjektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stock of knowledge Arifin terbentuk melalui pengalaman sebagai pendidik, aktivis sosial, serta keterlibatan dalam organisasi dan partai politik. Because motive memperlihatkan bahwa keputusan memasuki politik merupakan kelanjutan pengalaman pengabdian dan interaksi sosial. In-order-to motive menunjukkan orientasi untuk memperjuangkan aspirasi, membangun kepercayaan publik, menjaga hubungan dengan konstituen, dan mendukung fungsi DPRD. Makna komunikasi politik terus berkembang melalui intersubjektivitas dengan masyarakat, pemerintah daerah, sesama anggota DPRD, dan lingkungan partai politik.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan bagian penting dalam kehidupan politik karena menjadi medium yang menghubungkan aktor politik, masyarakat, dan lembaga pemerintahan. Dalam politik daerah, komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai proses penyampaian pesan politik, tetapi juga menjadi ruang interaksi untuk menyampaikan aspirasi, membangun hubungan dengan masyarakat, serta menghubungkan kepentingan masyarakat dengan proses kebijakan publik. Anggota DPRD sebagai aktor politik memiliki posisi strategis karena menjalankan fungsi representasi sekaligus fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran (Sulaiman, 2013).

Salah satu aktor yang menarik untuk dikaji adalah Arifin, S.Pd., M.H., Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes dari Daerah Pemilihan II dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Arifin terpilih pada pemilu 2024 dengan perolehan suara 5.611 suara dan merupakan legislator pendatang baru pada periode 2024–2029. Sebagai legislator yang pertama kali menduduki jabatan DPRD, Arifin menghadapi proses penyesuaian terhadap lingkungan politik formal, budaya kelembagaan, pola komunikasi di DPRD, serta relasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Status sebagai legislator pendatang baru menjadi penting karena pengalaman politik formal yang dimiliki tidak sama dengan legislator petahana. Meskipun demikian, Arifin tidak memasuki dunia politik tanpa pengalaman sebelumnya. Sebelum menjadi anggota DPRD, ia telah memiliki pengalaman sebagai pendidik sejak 2007, terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, organisasi, serta aktivitas kepartaian. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari pengetahuan dan pengalaman hidup yang dibawa ketika memasuki politik formal.

Dalam perspektif fenomenologi Alfred Schutz, pengalaman tersebut dapat dipahami melalui konsep *stock of knowledge*. Konsep ini menjelaskan bahwa individu membawa kumpulan pengalaman dan pengetahuan yang digunakan untuk memahami realitas sosial dan menentukan tindakan (Firmansyah & Cikka, 2024). Dengan demikian, tindakan komunikasi politik seorang legislator tidak muncul secara spontan, tetapi berkaitan dengan pengalaman hidup yang telah membentuk cara pandang terhadap realitas sosial.

Selain *stock of knowledge*, Schutz membedakan motif tindakan menjadi *because motive* dan *in-order-to motive*. *Because motive* berhubungan dengan pengalaman masa lalu yang menjadi latar belakang suatu tindakan, sedangkan *in-order-to motive* berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui tindakan tersebut (Sani'atin, 2019). Dalam penelitian ini, kedua konsep tersebut digunakan untuk memahami alasan Arifin memasuki politik formal dan tujuan yang ingin dicapai melalui komunikasi politiknya.

Komunikasi politik juga berlangsung melalui proses intersubjektivitas. Pemaknaan seseorang terhadap realitas sosial tidak hanya dibentuk oleh pengalaman individual, tetapi juga melalui interaksi Arifin dengan masyarakat, pemerintah daerah, sesama anggota DPRD, dan lingkungan partai politik.

Penelitian terdahulu mengenai komunikasi politik anggota DPRD umumnya berfokus pada pola komunikasi, penyerapan aspirasi, efektivitas komunikasi, atau hambatan komunikasi. Penelitian Nova Yohana (2016), misalnya, mengkaji motif dan tindakan anggota DPRD perempuan sebagai komunikasi politik dengan menggunakan fenomenologi Schutz. Sementara itu, penelitian oleh Ahmad Ryas Amin Dahlan Lase (2025) membahas pola komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. Penelitian mengenai pengalaman subjektif legislator pendatang baru dalam mengonstruksi makna komunikasi politik serta proses intersubjektivitas masih relative terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada pengalaman subjektif Arifin sebagai legislator pendatang baru dalam mengonstruksi makna, membangun intersubjektivitas, serta memaknai tindakan komunikasi politiknya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara pengalaman hidup, motif tindakan, proses interaksi sosial, dan konstruksi makna komunikasi politik Arifin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode kualitatif dan pendekatan Fenomenologi Alfred Schutz. Paradigma konstruktivisme digunakan karena penelitian ini berusaha memahami realitas berdasarkan pengalaman dan pemaknaan subjektif informan terhadap tindakan komunikasi politik yang dijalankannya.

Subjek penelitian adalah Arifin selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes periode 2024–2029. Informan dipilih secara purposive karena memiliki pengalaman langsung sebagai aktor komunikasi politik sekaligus legislator pendatang baru.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh pengalaman subjektif, motif tindakan, serta pemaknaan informan terhadap komunikasi politik. Observasi digunakan untuk melihat aktivitas komunikasi yang dilakukan informan dalam menjalankan perannya, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung terhadap aktivitas informan.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data wawancara ditranskripsikan kemudian direduksi berdasarkan konsep fenomenologi Alfred Schutz, yaitu *stock of knowledge*, *because motive*, dan *in-order-to motive*, dan intersubjektivitas. Hasil dari setiap kategori kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi makna komunikasi politik Arifin. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stock of Knowledge sebagai Dasar Pembentukan Makna Komunikasi Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman Arifin sebelum memasuki politik formal menjadi dasar penting dalam membentuk cara pandangya terhadap komunikasi politik. Pengalaman tersebut meliputi pengalaman sebagai pendidik, keterlibatan dalam pendidikan nonformal, aktivitas sosial dan kemasyarakatan, organisasi, serta kegiatan kepartaian.

Pengalaman sebagai pendidik membuat Arifin terbiasa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Pengalaman tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai bidang pendidikan, tetapi juga mempertemukannya dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pengetahuan praktis tersebut kemudian digunakan ketika Arifin menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD.

Salah satu pengalaman yang menjadi bagian pengetahuan tersebut adalah ketika Arifin menemukan persoalan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai kesulitan yang dialami masyarakat ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman tersebut kemudian menjadi bekal ketika menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD.

Pengalaman organisasi dan kepartaian juga memperluas pengetahuan Arifin mengenai cara kebutuhan masyarakat disampaikan melalui ruang organisasi dan bagaimana komunikasi digunakan untuk menghubungkan kebutuhan tersebut dengan pihak yang mempunyai kewenangan. Hal ini, pengalaman sebelum menjadi anggota DPRD membentuk pengetahuan praktis yang digunakan dalam memahami persoalan masyarakat dan menjalankan fungsi legislatif.

Pengalaman dalam perspektif Alfred Schutz tersebut merupakan bagian dari *stock of knowledge*. Arifin memasuki politik formal dengan membawa pengetahuan yang telah diperoleh dari dunia kehidupan sebelumnya (Supraja & Akbar, 2020). Oleh karena itu, status sebagai legislator pendatang baru tidak berarti bahwa ia tidak memiliki pengalaman yang relevan dengan praktik komunikasi politik. Sebaliknya, pengalaman sebelum memasuki politik formal menjadi dasar yang kemudian bertemu dengan pengalaman baru dalam lingkungan DPRD.

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik Arifin dibentuk oleh kesinambungan pengalaman. Pengalaman sebagai pendidik dan aktivis sosial memengaruhi kecenderungannya untuk mendengarkan persoalan masyarakat, memahami kebutuhan, dan menghubungkan persoalan tersebut dengan ruang kelembagaan yang dimilikinya sebagai anggota DPRD.

Because Motive sebagai Dasar Memasuki Dunia Politik

Because motive merupakan motif yang berorientasi pada masa lalu dan berhubungan dengan pengalaman yang melatarbelakangi suatu tindakan (Nindito, 2015). Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk memahami alasan Arifin memasuki politik formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Arifin untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD tidak muncul secara tiba-tiba. Keputusan tersebut merupakan kelanjutan dari pengalaman pengabdian yang telah dijalani melalui pendidikan, aktivis sosial, organisasi, dan kepartaian. Arifin menjelaskan:

“...saya bergerak di sosial saya tahu apa kebutuhan-kebutuhan di sana, saya bisa ngerti solusinya, saya juga ingin mengetahui permasalahannya, harapan-harapan yang ada di sana inilah yang menjadi latar belakang saya punya keinginan untuk maju.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman berinteraksi dengan masyarakat menjadi dasar munculnya keputusan untuk memasuki politik formal. Pengalaman tersebut membuat Arifin mengetahui kebutuhan, persoalan, dan harapan masyarakat.

Perspektif Schutz menjelaskan keputusan tersebut dapat dipahami sebagai *because motive* karena berakar dalam pengalaman masa lalu. Politik formal kemudian dimaknai sebagai ruang yang memungkinkan Arifin memperluas pengabdian yang sebelumnya dilakukan melalui pendidikan dan kegiatan sosial.

Dengan demikian, memasuki dunia politik bagi Arifin tidak menunjukkan perubahan arah kehidupan yang sepenuhnya terputus dari pengalaman sebelumnya. Sebaliknya, terdapat kesinambungan antara pengalaman pengabdian sebelum politik formal dengan peran sebagai legislator. Hal ini menjadi karakter penting dalam memahami komunikasi politik Arifin sebagai legislator pendatang baru.

In-Order-to Motive sebagai Orientasi Tindakan Komunikasi Politik

Berbeda dengan *because motive* yang berorientasi pada pengalaman masa lalu, *in-order-to motive* berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui tindakan (Nindito, 2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik Arifin diarahkan pada beberapa tujuan utama, yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat, membangun kepercayaan publik, menjaga hubungan dengan konstituen, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Komunikasi dengan masyarakat tidak hanya digunakan untuk menerima informasi, tetapi juga untuk memahami kebutuhan dan persoalan yang kemudian dapat dibawa ke dalam ruang kelembagaan. Dalam posisi sebagai anggota DPRD, komunikasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Orientasi tersebut juga terlihat dalam keinginan Arifin untuk meninggalkan manfaat bagi masyarakat setelah masa jabatannya berakhir. Ia menyampaikan:

“Saya berharap ketika nanti masa jabatan saya selesai, masyarakat tidak hanya mengingat saya sebagai anggota DPRD, tetapi mereka merasakan ada sesuatu yang memang bisa saya berikan untuk masyarakat.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi tindakan Arifin tidak berhenti pada pencapaian selama masa jabatan, tetapi diarahkan pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka lebih panjang.

Selanjutnya, *in-order-to motive* Arifin memperlihatkan orientasi komunikasi politik yang berhubungan dengan fungsi representasi. Komunikasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat dipahami, aspirasi dapat diperjuangkan, hubungan dengan konstituen tetap terjaga, dan pelaksanaan fungsi DPRD dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Intersubjektivitas dalam Pembentukan Makna Komunikasi Politik

Makna komunikasi politik Arifin tidak terbentuk hanya melalui pengalaman individual. Makna tersebut berkembang melalui interaksi dengan berbagai pihak selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.

Gambar 1. Interaksi Arifin dengan Masyarakat



Sumber: Diolah oleh peneliti 2026.

Interaksi dengan masyarakat menjadi salah satu ruang utama terbentuknya intersubjektivitas. Melalui interaksi tersebut, Arifin memperoleh informasi mengenai persoalan masyarakat, mendengarkan kebutuhan, dan memahami harapan yang kemudian dapat disampaikan melalui ruang kelembagaan.

Proses intersubjektivitas juga berlangsung dalam hubungan Arifin dengan pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Arifin berinteraksi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperoleh informasi, membahas persoalan, dan mencari pemahaman terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Gambar 2. Bimtek bersama Fraksi



Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Hubungan dengan sesama anggota DPRD juga menjadi ruang pembentukan pemahaman bersama. Diskusi dalam lingkungan lembaga legislatif memungkinkan Arifin menyesuaikan pemahamannya dengan situasi kelembagaan yang baru dihadapinya. Sementara itu, hubungan dengan lingkungan partai politik memberikan ruang untuk memperoleh pemahaman mengenai sikap dan orientasi politik partai.

Selanjutnya, intersubjektivitas dalam penelitian ini tidak sekadar menunjukkan adanya komunikasi antara Arifin dengan pihak lain, tetapi memperlihatkan bahwa makna komunikasi politik berkembang melalui proses mendengar, berdiskusi, menerima pandangan, menyampaikan aspirasi, dan mencari pemahaman bersama.

Bagi legislator pendatang baru, proses tersebut menjadi penting karena lingkungan politik formal merupakan dunia sosial baru yang harus dipahami. Pengalaman sebelumnya menjadi dasar awal, sedangkan interaksi dengan aktor lain memperluas dan menyesuaikan pemahaman tersebut dengan tuntutan peran sebagai legislator.

Konstruksi Makna Komunikasi Politik Arifin

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, konstruksi makna komunikasi politik Arifin terbentuk dari keterkaitan antara pengalaman, motif, tujuan, dan interaksi sosial.

Stock of knowledge memberikan dasar pengetahuan yang dibawa Arifin dari pengalaman hidup sebelumnya. *Because motive* menjelaskan latar pengalaman yang mendorong keputusan memasuki politik formal. *In-Order-to Motive* memberikan arah terhadap tindakan komunikasi politik, sedangkan intersubjektivitas menunjukkan bagaimana pemaknaan tersebut berkembang melalui hubungan dengan masyarakat dan aktor politik lainnya.

Berdasarkan hubungan tersebut, komunikasi politik Arifin dimaknai sebagai sarana untuk membangun dialog, memahami dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah, serta menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Makna tersebut tidak terbentuk semata-mata karena Arifin menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD. Makna tersebut terbentuk melalui proses yang lebih panjang. Arifin membawa pengalaman pendidikan, sosial, organisasi, dan kepartaian ke dalam politik formal. Pengalaman tersebut

kemudian bertemu dengan pengalaman baru di DPRD dan berkembang melalui interaksi dengan masyarakat, pemerintah daerah, sesama anggota DPRD, serta lingkungan partai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik Arifin merupakan tindakan sosial yang berangkat dari pengalaman, diarahkan oleh tujuan, dan memperoleh makna melalui hubungan dengan orang lain.

Dengan demikian, konstruksi makna komunikasi politik legislator pendatang baru dipahami sebagai proses yang dinamis. Status pendatang baru tidak berarti bahwa aktor tidak memiliki bekal pengalaman, tetapi menunjukkan adanya proses pertemuan antara pengalaman sebelum politik formal dengan pengalaman baru dalam lingkungan legislatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik Arifin sebagai legislator pendatang baru tidak dimaknai sekadar sebagai aktivitas penyampaian pesan politik, tetapi sebagai tindakan sosial yang digunakan untuk membangun dialog, memahami dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Konstruksi makna tersebut berangkat dari *stock of knowledge* yang terbentuk melalui pengalaman sebagai pendidik, aktivis sosial, serta keterlibatan dalam organisasi dan partai politik. Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi Arifin dalam memahami peran sebagai wakil rakyat dan menjalankan komunikasi politik. *Because motive* menunjukkan bahwa keputusan memasuki dunia politik merupakan kelanjutan dari pengalaman pengabdian dan interaksi sosial yang telah dijalani sebelumnya. Sementara itu, *in-order-to motive* menunjukkan bahwa tindakan komunikasi politik diarahkan pada upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat, membangun kepercayaan publik, menjaga hubungan dengan konstituen, membangun kolaborasi, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Makna komunikasi politik tersebut terus berkembang melalui proses intersubjektivitas dengan masyarakat, pemerintah daerah, sesama anggota DPRD, dan lingkungan partai politik. Melalui interaksi tersebut, Arifin membangun pemahaman bersama yang mendukung pelaksanaan fungsi representasi.

Dengan demikian, konstruksi makna komunikasi politik legislator pendatang baru merupakan hasil keterkaitan antara pengalaman hidup, orientasi tindakan, dan proses interaksi sosial. Ketiga aspek tersebut membentuk komunikasi politik sebagai tindakan sosial yang bermakna dalam menjalankan amanah dan fungsi representasi di DPRD Kabupaten Brebes. Berdasarkan hasil penelitian, bagi legislator, khususnya legislator pendatang baru, disarankan untuk terus membangun komunikasi politik yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bagi DPRD Kabupaten Brebes, disarankan untuk memperkuat komunikasi dan dialog antara anggota DPRD dengan masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan mengkaji konstruksi makna komunikasi politik pada legislator pendatang baru dengan legislator petahana menggunakan perspektif fenomenologi Alfred Schutz maupun pendekatan kualitatif lainnya. Perbandingan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pembentukan makna komunikasi politik dalam praktik legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Instrumen Pengumpulan Data. 1-20.
- Amanda. (2024, Desember 7). Retrieved from <https://dprd.brebeskab.go.id/>.
- Andini, D. F. (2025). *Strategi Komunikasi Politik Tim Pemenangan Sedulur Ahmad Luthfi di Brebes pada Pilkada Jateng Tahun 2024*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Anshori, I. (2018). Melacak State Of The Art Fenomenologi dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. *Islamic Education Journal*, 165-181.
- Arianto. (2025). Komunikasi Politik dalam Seni Budaya dan Perwayangan Pilkada tahun 2024. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 216-228.
- Arianto, B., & Handayani, B. (2024). *Pengantar Studi Fenomenologi*. Balikpapan: Borneo Novelty Publishing.

- Bachtiar, A. (2022). Strategi Komunikasi Politik PDI-P Menjelang Pemilu 2024 di Masa Pandemi COVID-19: Refleksi Partisipasi Politik Masyarakat di Era Modern dalam Mewujudkan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 241-254.
- Bahy, I. A., Abidin, Z., & Ema. (2025). Memahami Life-world Anak Yatim Dhuafa (Studi Fenomenologi Komunikasi Pengasuhan dan Konstruksi Makna di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 689-696.
- Batubara, J. (2017). Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 95-107.
- Benuf, K. (2018). Politik Hukum Legislasi dan Ideologi Pancasila. *Gema Keadilan Jurnal*, 85-92.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana.
- Djaya, T. R. (2020). Makna Tradisi Tedhak Siten pada Masyarakat Kendal: Sebuah Analisis Fenomenologi Alfred Schutz. *Jurnal Ekonomi, sosial & Humaniora*, 21-31.
- Etikan, I., Alkassim, R., & Abubakar, S. (2015). Comparison of Snowball Sampling and Sequential Sampling Technique. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 1-3.
- Fanny, N. (2021). *Dinamika Politik terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Purwokerto: State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Firmansyah, M. H., & Cikka, H. (2024). Motif Dakwah Publik Hijrah Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 128-141.
- Gunlu, R. (2016). A Conceptualization on the Political Actor in Turkey. *Ardahan University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal*, 1-26.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI.
- Hasanah, H. (2016). Teknik Teknik Observasi. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 21-46.
- Heeren, J. (2011). *The Wiley-Blackwell Companion to Major Social Theorists*. UK.
- Heriyanto, T. (2025, Desember Kamis). *Gagal CPNS, Ratusan Honorer Brebes Ngadu ke DPRD*. Retrieved from <https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/265874/18/12/2025/gagal-cpns-ratusan-honorer-brebes-ngadu-ke-dprd>
- Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021, Desember). Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif "Epistemologi Islam". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4, 870-880.
- Ischak, W. I., Badjuka, B. Y., & Zulfiayu. (2019). *Modul Riset Keperawatan*. Gorontalo: Poltekkes Kemenkes Gorontalo.
- , A. (2024). *Discoveries First: Panduan Praktis Riset DKV*. Yogyakarta: Selat Media Partners.
- Kintsch, W., & Mangalath, P. (2010). The Construction of Meaning. 346-370.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lombu, R. J., & Jannah, D. A. (2023). Strategi Kampanye hingga Peran Partai pada Pencalonan Legislatif Petahana dan Pendaftar Baru Tahun 2019. *Jurnal Pemerintah dan Politik*, 286-294.
- Mahanum. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *Journal Of Education*, 1(2), 1-12.
- Marta, S. (2014). Konstruksi Makna Budaya Merantau di Kalangan Mahasiswa Perantau. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, 27-42.
- Moleong, L. j. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudjia, R. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Research Repository*.
- Muhtadi, A. S. (2008). *Komunikasi Politik Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nindito, S. (2015). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi makna dan realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 79-94.
- Nurfajriani, W. V. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 826-833.

- Nurhaidah, S. N. (2025). *Dinamika dan Strategi Komunikasi Politik*. Lombok: CV Al-Haramain Lombok.
- Puspitasi, D. I. (2025). *Komunikasi Politik: Teori, strategi, dan penerapannya di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Putra, A. T. (2025). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Purwokerto: Penerbit Amerta Media.
- Rachman, A. A. (2026, June 6). Retrieved from <https://dprd.brebeskab.go.id/>.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara.
- Romdana, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 39-47.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Scocial Science Research*, 1-15.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Salma. (2023, Maret 17). *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh*. Retrieved from Deepublish Web Site: <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>
- Sani'atin, A. (2019). *Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Santoso, S., Kusnanto, E., & Saputra, M. R. (2022). Perbandingan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Serta Aplikasinya dalam Penelitian Akuntansi Interpretatif. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 351-360.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Shibghotulloh, D. A., Al-Banjari, H., & Djuyandi, Y. (2020). Peran Aktor dalam Proses Pembentukan Dinasti Politik (Studi Kasus di Kabupaten Purwakarta). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1-23.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sulaiman, A. I. (2013). Komunikasi Politik dalam Demokratisasi. *Journal Kementerian Komunikasi dan Informatika*, 119-131.
- Supraja, M., & Akbar, N. A. (2020). *Alfred Schutz (Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supraja, M., & Akbar, N. A. (2020). *Alfred Schutz: Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial*. Yogyakarta, Depok, Sleman : Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI dan APPTI.
- Supriadi, Y. (2017). Komunikasi Politik DPRD dalam Meningkatkan Peran Legislatif di Kota Bandung. 25-36.
- Surokim. (2016). *Riset Komunikasi (Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula)*. Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik.
- Syidqi, M. N., & Sobur, A. (2021). Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis. *Prosiding Jurnalistik*, 120-124.
- Tazri, M. (2019). Cebong dan Kampret dalam Perspektif Komunikasi Politik Indonesia. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, 1-7.
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Uno, H. B. (2020). Paradigma Penelitian. *Journal Pendidikan Dasar Pascasarjana*, 1-11.
- Wijaya, F. R., Lubis, F. A., Siregar, N. S., & Batubara, A. A. (2025). Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait. *Jurnal Edukatif*, 271-276.
- Yuniartin, T. (2018). Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 257-274.